

## Dua Staf Ahli Jadi Plt BKPSDM dan Dinkop

**SALATIGA (KR)** - Pj Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi melalui Sekda Salatiga, Wuri Pujiastuti menunjuk dan memerintahkan dua staf ahli walikota untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Koperasi UKM. "Kami menunjuk staf ahli walikota untuk menjadi Plt Kepala Dinas Koperasi dan BKPSDM," kata Wuri Pujiastuti kepada KR, Rabu (1/2).

Kedua Staf Ahli Walikota Salatiga tersebut adalah Agung Hendratmiko menjadi Plt Dinas Koperasi UKM, kemudian Ardiyantara menjadi Plt BKPSDM yang menggantikan Adi Isnanto yang kembali ke staf ahli setelah 6 bulan menjabat Plt Kepala BKPSDM. Sementara itu untuk jabatan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk sementara dijabat kepala bidang (Kabid). Diketahui sebelumnya pte 1 Februari 2023 sejumlah ASN di Salatiga pensiun di antaranya adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Roch Hadi dan Sekretaris BPKPD, Marhadi. (Sus)-f

## Transporter Mogok, Puluhan Ribu Aqua Galon Telantar

**KLATEN (KR)** - CV Bintang Jaya (BJ), mogok operasional dan mengkandangan 75 unit armadanya sejak Rabu (1/2). Hal tersebut sebagai protes menuntut kenaikan ongkos angkut pada distributor CV Wahyu Jaya Mitra Mulya (WJMM). Aksi tersebut mengakibatkan puluhan ribu Aqua kemasan galon tidak terdistribusi ke berbagai daerah. Manager CV Bintang Jaya, Kurnia Sukma mengemukakan, selama enam tahun tidak pernah ada kenaikan biaya pengangkutan dari WJMM.

Sejak tahun 2016, BJ harus memberi subsidi agar operasional terus berjalan sesuai standar pengangkutan. Telah dilakukan negosiasi baik dengan WJMM maupun dengan PT Tirta Investama/TIV (Pabrik Aqua Klaten), namun belum memberikan hasil sesuai harapan. "Selanjutnya pada November 2022 negosiasi dengan TIV, meskipun masalah dengan WJMM toh sumber awalnya dari TIV, WJMM dibayarnya juga oleh TIV. Begitu November kita evaluasi final, ini sudah tidak bisa menutupi antara biaya operasional armada dengan biaya angkut yang diberikan pada Bintang Jaya," kata Kurnia.

Sebanyak 75 unit armada tersebut biasanya melayani rute pendistribusian Aqua di Klaten, Yogya, Solo, Wonogiri, Sragen, dan Kartasura. "Terdiri 50 unit armada besar dan 25 armada kecil. Untuk armada besar kapasitas 1.000 galon sekali jalan. Kalau ke kartasura sehari bisa dua kali jalan, jadi sehari bisa hampir 100.000 galon," jelas Kurnia. Stakeholder Relation Manager Pabrik Aqua Klaten, Rama Zakaria saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengemukakan, sebenarnya sudah beberapa kali mengupayakan adanya penyelesaian bersama. Namun demikian, PT TIV tak ingin terlalu intervensi, karena persoalan tersebut pada ranah business to business antara BJ dan WJMM. (Sit)-f

## Respons Isu Penculikan, Tidak Perlu Panik

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Pranowo memerintahkan semua dinas untuk mengaktifkan dan mensosialisasikan nomor kontak. Hal itu guna menanggapi isu maraknya penculikan anak belakangan ini. Ganjar Pranowo mengatakan hal itu kepada wartawan di Semarang Kamis (2/2), menanggapi soal maraknya kasus penculikan anak. Dengan adanya nomor kontak di tiap dinas akan memudahkan masyarakat mengakses laporan atau aduan. "Bisa juga lewat aplikasi," ujar Ganjar.

Ganjar Pranowo mengakui banyak mendapat pesan WhatsApp terkait isu penculikan, seolah-olah kasus tersebut sangat gawat. Masalah ini ini memang sudah menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Orang bisa melakukan tindakan kriminal penculikan anak, trafficking. Pemerintah harus peduli terhadap permasalahan ini.

Ganjar Pranowo meminta masyarakat agar tidak panik dalam merespons isu maraknya penculikan anak tersebut. Ganjar menghimbau kepada para orangtua supaya lebih peduli dan sayang kepada anak. "Jangan bikin cemas masyarakat. Kalau ada isu penculikan dan sebagainya, laporkan ke aparat terdekat. Yang paling penting, keluarga mesti menjaga anak-anaknya. Rasa peduli dan sayang bukan hanya kepada anak sendiri, melainkan juga kepada semua anak yang ada di sekitar.

Menurut Ganjar Pranowo, DP3AKB Provinsi Jateng juga telah lama membuka care center untuk pendampingan pada perempuan dan anak. Kontak yang bisa dihubungi yakni pada nomor 085799664444 untuk layanan kekerasan atau konsultasi kekerasan. Selain itu juga ada layanan konsultasi keluarga pada nomor 08579-99972111 atau juga bisa menghubungi nomor 024 7663-2577. (Bdi)-f

## Investor Diharap Tanam Modal di Magelang

**MAGELANG (KR)** - Para pengusaha atau investor diharapkan dapat menanamkan modalnya di wilayah Kota Magelang dengan nyaman. Semuanya akan dibantu, termasuk masalah perizinannya. Di Kota Magelang sudah ada Mal Pelayanan Publik (MPP), masalah pelayanan dibuka seluas-luasnya.

Demikian dikemukakan Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH saat meresmikan pembangunan tahun anggaran 2022 dan launching IKM Centre Kota Magelang di IKM Centre Kota Magelang, Kamis (2/2).

Walikota Magelang, Wakil Walikota Magelang Drs HM Mansyur MAg, Sekretaris Daerah Kota Magelang Drs Joko Budiyo MM dan salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin melakukan launching IKM Centre Kota Magelang dengan menepelkan salah satu telapak tangannya di layar monitor.

Walikota Magelang mengatakan

pengalamannya melakukan kunjungan ke Kota Singkawang Kalimantan Barat, beberapa hari lalu. Dikatakan, nilai investasinya besar. Walikota Magelang memiliki harapan Kota Magelang nantinya dapat seperti Kota Singkawang. Kemungkinan akan dipergunakan cara lain, khususnya cara bagaimana mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Supaya para pengusaha atau investor ini bekerja di Kota Magelang atau menanamkan modalnya di Kota Magelang dengan nyaman," katanya.

Berkaitan dengan pembangunan yang diresmikan ini, Walikota Magelang berharap ada kemanfaatan dan kelanjutan dari beberapa bangunan yang dibangun dan diresmikan. Jangan sampai dibangun, tetapi nanti tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Magelang dalam laporannya mengatakan PAD Kota Magelang dari tahun ke tahun terus meng-



KR-Thoha

**Walikota Magelang menandatangani prasasti peresmian.**

alami peningkatan. Sesuai data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa PAD Kota Magelang masuk ranking ke-8 dari APBD Kota se Indonesia. Ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan bagi Kota Magelang.

Dalam waktu 5 tahun terakhir PAD Kota Magelang mengalami ke-

naikan signifikan. Tahun 2018 Rp 247,964 milyar, Tahun 2019 Rp 273,582 milyar, Tahun 2020 Rp 290,756 milyar, Tahun 2021 Rp 319,352 milyar dan Tahun 2022 Rp 376,148 milyar. Selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan Rp 128,-184 milyar atau 51,69 persen.

(Tha)-f

## Pengguna Knalpot Brong Akan Ditindak

**BOYOLALI (KR)** - Kapolres Boyolali, AKBP Petrus Silalahi memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas pengguna knalpot tidak standar pabrik atau knalpot brong (blombongan) di wilayah hukum Polres Boyolali.

Pasalnya, mengganggu ketertiban umum karena suara yang bising saat dijalan.

"Kami sepatutnya kendaraan knalpot brong memang harus ditindak dan diberantas. Sehingga Boyolali bebas kendaraan berknalpot yang terdengar membisikan telinga, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Boyolali terus melakukan razia kendaraan yang menggunakan knalpot brong dengan tindakan mengandangkan dan penindakan tilang," kata Petrus, Rabu (1/2).

Ia mengatakan Satlantas telah

melakukan patroli dengan merazia kendaraan knalpot brong. Karena, selain membuat bising mereka mengendarai sepeda motor dengan ugul-ugulan di jalan. Mayoritas pengguna knalpot brong di Boyolali banyak dikendarai oleh anak-anak muda. Untuk itu, polisi melakukan penindakan selain mengandangkan kendaraannya, pelanggar juga dikenai sanksi tilang," katanya.

Kapolres menambahkan, salah satu yang menjadi poin penting adalah pengemudi atau pemilik kendaraan itu, setelah membayar



KR-Mulyawan

**AKBP Petrus Silalahi**

denda tilang dapat mengambil kendaraannya usai mengganti knalpot dengan standar pabrik. Hal itu, terus dilakukan selain penindakan, polisi juga memberikan sosialisasi imbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan knalpot brong. Satlantas

Polres Boyolali juga sudah membuat spanduk imbauan agar masyarakat Boyolali tidak menggunakan knalpot brong. Polisi secara kontinyu melakukan penindakan pengendara yang menggunakan knalpot tidak standart pabrik atau brong.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Boyolali, AKP M. Herdi Prata-ma mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan 30 kendaraan berknalpot brong di wilayah Boyolali sepekan terakhir ini. Pelanggar dikenai penindakan tilang dan wajib mengganti knalpot dengan yang normal. "Kami sejak awal Januari hingga minggu ketiga Januari ini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan kendaraan menggunakan knalpot brong," ujar Herdi. (R-3)-f

## Sampah di Stadion Jati Diri Berserakan

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo geleng-geleng kepala saat melihat banyak sampah berserakan di areal sekitar Stadion Jatidiri Semarang, usai digunakan untuk pertandingan PSIS Semarang melawan Persib Bandung Selasa (31/1) malam. Ganjar juga menyoreti manajemen parkir yang masih harus ditata dan perbaikan beberapa proyek pekerjaan yang dinilai kurang maksimal.

Hal itu diungkapkan Ganjar Pranowo kepada wartawan saat sidak Stadion Jatidiri Semarang di sela olahraga jalan sehat, Rabu (1/2) pagi.

"Saya hanya cek Stadion Jatidiri pasca pertandingan, karena ada complain dari warga. Satu, parkir. Berarti butuh tempat parkir kalau ada pertandingan seperti kemarin antara PSIS lawan Persib. Butuh tempat parkir sehingga traffic management-nya musti disiapkan. Kedua, memang musti mengedukasi semua orang karena ternyata sampahnya dahsyat," tutur Ganjar.

Sampah-sampah yang berserakan itu sudah tampak mulai dari depan gerbang Timur kawasan GOR Jatidiri. Sampah semakin berserakan saat Ganjar memasuki arel sekitar stadion. Sampah berupa plastik, botol plastik, hingga kardus sisa makanan berserakan di setiap sudut. Ini

berarti stadion Jati Diri masih butuh banyak tempat sampah.

Melihat kondisi pasca-pertandingan yang banyak sampah itu, Ganjar minta agar manajemen GOR Jatidiri mengevaluasi. Ia juga berharap pihak pengelola termasuk para suporter agar ikut menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Untuk membersihkan areal Stadion Jatidiri dari sampah cukup memakan waktu lama.

"Pihak manajemen musti memperbaiki agar pasca pertandingan tidak terjadi tumpukan sampah. Tadi saya tanya, ini butuh waktu paling tidak tiga hari untuk bersihkan sampah. Ini juga perlu alat bantu untuk bisa mempercepat sekaligus uji coba ketika ada even-event besar seperti apa kemudian kondisi pemanfaatannya," tutur Ganjar.

Selain mengecek complain warga mengenai parkir dan sampah di Stadion Jatidiri, Ganjar juga mengecek ulang beberapa pekerjaan yang dinilai kurang maksimal. Beberapa waktu lalu Ganjar memang sempat mengecek perkembangan proyek di kawasan Jatidiri Semarang, dan menemukan banyak pekerjaan yang kurang bagus, seperti adalah pohon yang batangnya dicor. Ketika dicek ulang, ternyata pohon lama justru ditebang dan diganti pohon baru. (Bdi)-f

## LLDikti VI Jateng Kampanyekan Go Beyond

**SEMARANG (KR)** - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jateng menggelar rapat koordinasi dengan mengundang semua pimpinan badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi (PT) se-Jateng di Patra, Rabu (1/2). Mengangkat tema "Kerja Bersama Brayat Agung Pendidikan Tinggi Jateng untuk Mewujudkan Tata Kelola Perguruan Tinggi Berkualitas", raker dibuka Kepala LLDikti Jateng Bhimo Widyo Andoko SH MH.

Sedikitnya 4 narasumber utama dihadirkan Dr Lukman MHum (Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi), Prof Dr rer nat Imam Buchori ST (Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT), Prof Dr Ir Ari Purbayanto MSc (Ketua Dewan Eksekutif BAN-PT) dan Dessy Aliandrina ST MSc PhD (Pelaksana Pusat Kampus Merdeka Mandiri). Diharapkan, melalui Rakor ini, LLDIKTI Wilayah VI dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Jawa Tengah mempunyai persepsi, visi dan misi serta komitmen untuk meningkatkan kualitas dan berkontribusi secara signifikan dalam mengangkat reputasi pendidikan tinggi Jawa Tengah dan Indonesia.

Kepala LLDIKTI Wilayah VI dalam laporannya mengungkapkan ada 3 tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yaitu mendorong peningkatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi menuju World Class University, memberikan pemahaman terkait sistem/kebijakan akreditasi perguruan tinggi dan program studi di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan menyediakan fasilitas hak belajar tiga semester di luar program studi melalui program Kampus Merdeka Mandiri. (Sgi)-f

## Intervensi Khusus Perlindungan Tiga Lapisan Tekan Stunting

**PURBALINGGA (KR)** - Kabupaten Purbalingga melakukan intervensi khusus dengan perlindungan tiga lapisan untuk menekan prevalensi stunting. Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting Kabupaten Purbalingga pada angka 26,8 persen. Angka prevalensi ini malah naik 10 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 16,8 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dr. Jusi Febrianto saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jateng drg Widwiono dan jajarannya serta Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jateng, Selasa (31/1). "Langkah nyata yang sudah kami lakukan adalah intervensi di salah satu desa yaitu Karangaren yang dinilai cukup berhasil dengan cara perlindungan dengan tiga layer (lapisan)," kata Jusi Fe-

brianto. Menurut Jusi, intervensi pertama adalah di Posyandu yakni semua balita diberikan susu dan telur setiap posyandu, dan keluarga diberikan bibit untuk beternak lele. Intervensi kedua dilakukan di Puskesmas berupa deteksi sedini mungkin sebelum stunting. Pada kasus stunting diberikan pemberian makanan tambaha (PMT) selama 2 minggu sampai 1 bulan, dan dikoreksi.

Intervensi ketiga menurut Jusi dilakukan di rumah sakit yakni pada kasus yang belum terkoreksi dengan baik setelah 1 bulan dengan pengawasan Puskesmas, akan diawasi oleh dokter spesialis di Rumah Sakit dan diberikan Pangan Olahan Untuk Kondisi Medis Khusus (PKMK), yaitu PMT khusus yang hanya bisa diberikan dari RS, setelah membaik akan dikembalikan ke Puskesmas.

"Metode ini dirasa cukup efektif menurunkan angka stunting. Di desa Karangaren

selama 6 bulan dapat menurunkan 6% stunting dari 18% menjadi 12%. Diharapkan apabila anggaran cukup, bisa ditekan ke 57 desa lainnya," jelas dr Jusi dalam pertemuan di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.

Menanggapi hal itu Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah drg. Widwiono mengatakan optimistis bahwa Kabupaten Purbalingga dapat menurunkan angka stunting dengan komitmen dan kerjasama lintas sektor, aksi konvergensi yang didukung oleh pemerintah kabupaten.

"Secara keseluruhan angka prevalensi stunting di Jawa Tengah turun 0,1% yaitu dari 20,9% menjadi 20,8%. Akan tetapi di Kabupaten Purbalingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun lalu 16,8% menjadi 26,8%. Nah ini mungkin akan kita jadikan perhatian khusus kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan sampai dengan 10% di Kabupaten Purbalingga," kata Widwi-

ono. Menurut Widwiono, pemberian intervensi yang tepat untuk keluarga beresiko stunting yaitu pemenuhan gizi berupa protein hewani bisa diperpleh dari ikan atau telur minimal 1 butir per hari, sehingga sudah tidak lagi direkomendasikan pemberian biskuit untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan juga pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi calon pengantin.

Dijelaskan oleh Widwiono bahwa strategi lain yang bisa dilakukan adalah dengan cara pemantauan yang ketat untuk Z-score di dinas kesehatan, artinya ketika diukur sudah terdapat -1,5 Standar Deviasi (SD) harus segera diintervensi untuk pencegahan, agar tidak terlambat menjadi -2 SD (pendek) bahkan -3 SD (sangat pendek). Oleh karenanya Dinas Kesehatan sebagai Ketua Intervensi Spesifik punya peran penting dalam hal ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga menyambut baik

hal ini, dengan harus tetap memperhatikan data, dan juga disandingkan dengan data pembanding yang ada yaitu e-PPGBM yang sudah rutin dilaksanakan di kabupaten Purbalingga. "Bupati sudah konsen untuk mengatasi Percepatan

Penurunan Stunting, sementara ini regulasi sedang disusun. Sekalipun pendampingan sudah dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), kami akan tetap mengawal dan merunut dari awal penyebab stunting," jelas Herni Sulastri. (Ati)-f



KR-Istimewa

**Kadinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dr Jusi Febrianto menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jateng drg Widwiono dan jajarannya serta Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jateng.**